

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA SEKOLAH DI RA SBB AL FIKRI MANCA BANTUL

THE IMPLEMENTATION OF CHARACTER EDUCATION POLICY BASED ON SCHOOL CULTURE AT RA SBB AL FIKRI MANCA

Oleh: Nur Fatimah, Universitas Negeri Yogyakarta
nurfatimah.2018@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi, faktor pendukung, dan faktor penghambat kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah di RA SBB Al Fikri Manca Bantul. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah dipengaruhi enam aspek yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi atau tanggapan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Faktor pendukung meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, program penunjang pendidikan karakter, dan pemberian *reward*. Faktor penghambat meliputi beberapa sarana dan prasarana rusak, kurangnya sumber dana, sedikitnya guru, anak sulit dikondisikan, dan beberapa orang tua kurang paham dengan keberlanjutan pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah.

Kata kunci: Implementasi, faktor pendukung, faktor penghambat, pendidikan karakter berbasis budaya sekolah

Abstract

This study aims to describe the implementation, supporting factors, and inhibiting factors of school culture-based character education policies at RA SBB Al Fikri Manca Bantul. This type of research is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation studies. The data analysis technique uses the Miles, Huberman, and Saldana models. Test the validity of the data using triangulation techniques and sources. The results showed that the implementation of school culture-based character education policies was influenced by six aspects, namely policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing organizations, disposition or responses of implementers, inter-organizational communication and implementation activities, as well as the social, economic, and political environment. Supporting factors include human resources, facilities and infrastructure, character education support programs, and rewards. Inhibiting factors include some damaged facilities and infrastructure, lack of funding sources, few teachers, difficult children being conditioned, and some parents not understanding the sustainability of character education implemented in schools.

Keywords: Implementation, supporting factors, inhibiting factors, school culture-based character education.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pada kenyataannya, pendidikan merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan suatu agama, bangsa, dan negara. Pendidikan diperlukan manusia dalam mengembangkan pengetahuan, potensi yang dimiliki, serta membentuk kepribadian. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa “Pendidikan merupakan usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.” Bunyi pasal tersebut, menunjukkan bahwa melalui pendidikan warga negara dapat mengembangkan dirinya menjadi masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negara. Kualitas pendidikan yang baik akan membentuk manusia yang berkualitas juga, sehingga dengan adanya Undang-undang tersebut diharapkan agar generasi penerus bangsa dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan guna menghadapi arus globalisasi yang sangat cepat saat ini. Perubahan era globalisasi

yang sangat cepat dalam kehidupan masyarakat Indonesia menyebabkan banyak persoalan yang melanda terutama mengenai krisis moral. Hal itu membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mengedepankan nilai karakter. Dwiningrum (2014: 241) menyatakan bahwa krisis karakter bersifat struktural dan kultural. Secara struktural krisis moral telah terjadi diseluruh level kehidupan masyarakat Indonesia, dan secara kultural krisis moral ditandai dengan melemahnya nilai-nilai yang diperlukan dalam membangun karakter bangsa.

Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). PPK merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang diamanatkan dalam Nawacita Nomor 8. Peraturan Presiden tersebut diharapkan mampu memperbaiki dan melengkapi ketidaksesuaian antara harapan pemerintah dengan kenyataan yang ada di lapangan, menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, dan mampu mengembalikan nilai moral Pancasila yang lambat laun mulai pudar melalui penguatan pendidikan karakter yang dilaksanakan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan dan tentunya dengan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Namun, pada kenyataannya masih banyak sekolah

yang mengedepankan nilai akademik dan kurang memperhatikan nilai karakter. Maka dari itu, sangat wajar jika problem moral menjadi persoalan akut dalam kehidupan manusia. Hal tersebut kemudian menempatkan pentingnya pengembangan pendidikan karakter bagi manusia. Pendidikan karakter menjadi salah satu pilihan untuk menanggulangi degradasi moral yang sedang menimpa bangsa Indonesia di setiap jenjang usia.

Pendidikan karakter merupakan suatu keharusan yang harus ditanamkan sejak usia dini. Usia dini merupakan masa keemasan (*golden age*) yang merupakan masa rentang bagi kehidupan manusia di mana otak dan fisik manusia sedang dalam perkembangan yang sangat pesat. Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan yang membantu pertumbuhan dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD sendiri merupakan tahap awal dari proses pendidikan yang ditempuh seorang anak dan diselenggarakan secara terstruktur dengan tujuan mampu menjawab berbagai tantangan dan krisis moral pada era

globalisasi saat ini, meskipun pada kenyataannya belum banyak satuan pendidikan anak usia dini yang berfokus pada penerapan dan pengembangan pendidikan karakter peserta didik. Hal itu disebabkan adanya tuntutan pihak luar yang mengutamakan perkembangan kognitif sehingga mengesampingkan nilai moral dan budi pekerti peserta didik.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal, tidak menjamin implementasi pendidikan karakter berjalan dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan kebijakan yang ada belum mampu mengatasi persoalan moral yang melanda bangsa Indonesia saat ini. Pernyataan tersebut tentunya berdampak pada implementasi pendidikan karakter di sekolah, seperti: (1) Masih sering dijumpai sekolah atau pihak terkait belum sepenuhnya memperhatikan *setting* ruangan maupun pemenuhan kebutuhan berbagai fasilitas dalam menunjang proses implementasi pendidikan karakter; (2) Adanya sistem pengorganisasian yang kurang diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah sehingga mengakibatkan masih belum jelas pelaksanaannya; (3) Sekolah harus memperhatikan metode pembelajaran yang

diajarkan kepada peserta didik karena masih dijumpai metode pembelajaran yang kurang pas diterapkan pada anak usia dini; (4) Diperlukan peran orangtua dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah.

Fokus penelitian ini pada pendidikan karakter berbasis budaya sekolah. Hal tersebut dikarenakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah memiliki cakupan lebih luas daripada pendidikan karakter berbasis kelas, sehingga akan lebih mudah bagi anak untuk memahami dan mengerti mengenai nilai karakter yang diajarkan oleh guru melalui pembiasaan, pendampingan, pengembangan tradisi sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, evaluasi norma dan peraturan sekolah, dan pengembangan lingkungan sekolah yang kaya akan sejarah.

Umaroh (2018: 65) dalam penelitiannya yang berjudul “Membangun Karakter Anak Usia Dini melalui Budaya Sekolah Usia 5-6 Tahun di Raudhatul Athfal Nurul Huda Suban Lampung Selatan” menyatakan bahwa membangun karakter usia dini sangat penting di stimulasi sejak dini melalui pembiasaan anak dan keteladanan dalam kegiatan pembelajaran baik dari guru, warga sekolah maupun orangtua di rumah. Pelaksanaan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah dapat dilaksanakan melalui pembiasaan dan keteladanan di sekolah.

Hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa perlunya penanaman pendidikan karakter berbasis sekolah di semua jenjang pendidikan, salah satunya yaitu PAUD.

RA SBB Al Fikri Manca Bantul dipilih sebagai lokasi penelitian karena RA SBB Al Fikri Manca Bantul merupakan salah satu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengedepankan pentingnya pendidikan karakter bagi peserta didik. Hal tersebut tercermin pada bunyi visi dan misi sekolah, pedoman pembelajaran pendidikan karakter yang terintegrasi dalam program unggulan terutama 9 (sembilan) pilar karakter, penerapan pendidikan karakter melalui tiga pendekatan, dan berdasarkan pra observasi yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa sekolah telah mampu menghasilkan lulusan berbudi pekerti dan sopan santun lebih baik atau unggul dibandingkan lulusan sekolah lainnya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengulas lebih dalam mengenai implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah di RA SBB Al Fikri Manca Bantul.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan menjawab secara mendetail fenomena

atau fakta-fakta di lapangan tentang implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah di RA SBB Al Fikri Manca Bantul.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi di RA SBB Al Fikri Manca yang beralamatkan di Mulekan, Tirtosari, Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55772 pada bulan Februari sampai April 2022.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala sekolah, guru, dan orang tua peserta didik RA SBB Al Fikri Manca Bantul. Seluruh informan dipilih melalui *purposive sampling* karena didasarkan atas pertimbangan kualifikasi informasi terkait implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah di RA SBB Al Fikri Manca Bantul. Selain itu, informan yang dipilih telah representatif terhadap bidang kerja yang berkaitan dengan pendidikan karakter.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Instrumen Penelitian

Instrumen kunci pada penelitian ini adalah manusia karena peneliti sebagai pengumpul data utama. Selain itu, peneliti

turut dibantu dengan alat berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman studi dokumentasi.

Uji Keabsahan

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggabungkan antara triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Artinya, data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara kemudian akan dicek kesesuaiannya dengan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data observasi dan dokumentasi

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 12) yang menerapkan tiga langkah dalam menganalisis data yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini merupakan hasil kegiatan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dilakukan pada bulan Februari sampai April 2022 terhadap 5 (lima) narasumber sebagai sumber informasi mengenai implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah di RA SBB Al Fikri Manca

Bantul. Terdapat 6 (enam) indikator dari Van Meter dan Van Horn yang menjadi penentu kinerja implementasi kebijakan yaitu: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi atau tanggapan pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah di RA SBB Al Fikri Manca Bantul.

Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah di RA SBB Al Fikri Manca Bantul

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan yang dimiliki sekolah menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah di RA SBB Al Fikri Manca Bantul. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2012: 160) bahwa tingkat keberhasilan kinerja implementasi kebijakan dapat diukur dari standar dan tujuan kebijakan yang realistis dengan kultur yang ada pada level pelaksanaan kebijakan.

Landasan hukum yang digunakan sekolah sebagai pedoman pada proses implementasi kebijakan pendidikan

karakter berbasis budaya sekolah RA SBB Al Fikri Manca Bantul adalah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal. Selain regulasi, terdapat pedoman yang termuat dalam 9 (sembilan) pilar karakter dari *Indonesia Heritage Foundation* (IHF) dalam implementasi pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Peraturan juga dikeluarkan oleh sekolah yaitu berupa Standar Operasional Prosedur (SOP).

Tujuan kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah di RA SBB Al Fikri Manca Bantul adalah sebagai pedoman sekolah dalam membentuk generasi bangsa yang bermoral dengan melakukan pembiasaan nilai-nilai karakter di lingkungan sekolah. Secara umum tujuan kebijakan pendidikan karakter tertuang dalam visi misi sekolah, sedangkan secara terperinci tujuan kebijakan pendidikan karakter tertuang dalam tujuan lembaga sekolah.

Jadi, dapat diketahui bahwa RA SBB Al Fikri Manca Bantul dalam implementasi kebijakan pendidikan karakter menggunakan standar yang jelas

dan tujuan untuk membentuk generasi bangsa yang bermoral melalui pembiasaan nilai-nilai karakter di lingkungan sekolah. Hal itu sesuai dengan indikator standar dan tujuan kebijakan dari Van Meter dan Van Horn.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah di RA SBB Al Fikri Manca Bantul sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan sumber daya manusia, sumber dana, dan sarana prasarana. Hal itu sejalan dengan pendapat Winarno (2012: 161) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi adanya kemampuan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah di RA SBB Al Fikri Manca Bantul meliputi kepala sekolah, guru, komite sekolah, anak, dan orang tua/wali murid yang memberikan dukungan bagi perkembangan karakter anak. Sumber dana berasal dari swadaya wali murid dan Kementerian Agama berupa Biaya Overhead Pabrik (BOP). Sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah meliputi Alat Permainan Edukatif (APE), buku

cerita, boneka tangan, peralatan yang dimiliki sekolah, sarana prasarana untuk kegiatan ekstrakurikuler, dan fasilitas pendukung lainnya.

Jadi, dapat diketahui bahwa RA SBB Al Fikri Manca Bantul sudah memiliki sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber dana, dan sarana dan prasarana dalam menunjang implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa indikator sumber daya dalam konsep teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sudah terpenuhi.



Gambar 1. Alat Permainan Edukatif Luar

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah di RA SBB Al Fikri Manca Bantul meliputi struktur birokrasi, norma-norma, dan pembagian peran antara sekolah dan orang tua dalam mengintegrasikan penanaman pendidikan karakter, ketiganya berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah yang sedang dilaksanakan.

Hal ini diperkuat dengan pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012: 166) bahwa karakteristik badan-badan pelaksana adalah struktur birokrasi yang memiliki norma-norma dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif.

Struktur birokrasi yang dimiliki sekolah terintegrasi dengan Tim Pengembang Kurikulum. Salah satu program dalam Tim Pengembang Kurikulum tersebut adalah pendidikan karakter. Pelaksanaan pendidikan karakter memerlukan koordinasi yang sistematis dan kolaboratif antarpihak yang bersangkutan. Garis koordinasi yang ada berfungsi memberi petunjuk tegas terhadap tupoksi masing-masing komponen. Selain struktur birokrasi, sekolah juga memiliki norma-norma yang dianut dalam implementasi kebijakan pendidikan karakter berupa tata tertib. Tata tertib sekolah meliputi tata tertib sekolah, tata tertib siswa, tata tertib guru, tata tertib orang tua dan tata tertib memakai seragam. Sekolah juga melakukan pembagian peran antara guru dan orang tua yaitu guru lebih memahami konsep pendidikan karakter, sementara orang tua sebagai pendukung keberhasilan pendidikan karakter yang ditanamkan baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat agar saling berkesinambungan.

Jadi, dapat diketahui bahwa struktur birokrasi, norma-norma, dan pembagian

peran antara sekolah dan orang tua dalam mengintegrasikan penanaman pendidikan karakter adalah beberapa karakteristik yang dimiliki RA SBB Al Fikri Manca Bantul dalam implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah. Hal itu sesuai dengan indikator karakteristik organisasi pelaksana yang dari teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA RA SBB AL FIKRI MANCA
NOMOR: 09 /RA /KTSP/VII/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENGEMBANG KTSP
RAUDHATUL ATHFAL SBB AL FIKRI MANCA
TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1	Nugroho Tri Yudianto, S.E.,S.Pd	Pembina	Ketua Yayasan
2	Duwi Wahyuni, A.Md.,S.Pd	Ketua Tim kurikulum	Kepala Sekolah
3	Rima Mahawati	Sie kurikulum	Guru Kls
4	Novi Astuti	Anggota	Guru kls
5	Widayati, S.Psi	Anggota	Guru Kls
6	H. Suseno	Anggota	Ketua Komite (KPO)

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 28 Juni 2021
Kepala RA SBB Al Fikri Manca
Duwi Wahyuni, A.Md.,S.Pd

Gambar 2. Susunan Tim Kurikulum

4. Disposisi atau Tanggapan para Pelaksana

Disposisi atau tanggapan para pelaksana kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah di RA SBB Al Fikri Manca Bantul tercermin pada tugas yang dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Semua tugas yang dijalankan dalam rangka menyukseskan implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya

sekolah yang sedang dilaksanakan. Hal itu diperkuat pernyataan Winarno (2012: 168) bahwa sikap atau tanggapan implementor terhadap implementasi kebijakan diidentifikasi menjadi 3 (tiga) unsur yakin: kognisi (komprehensi atau pemahaman), tanggapan (penerimaan, netralitas, penolakan), dan intensitas tanggapan.

Pelaksana kebijakan karakter berbasis budaya sekolah di RA SBB Al Fikri Manca Bantul yaitu kepala sekolah, guru, orang tua/wali, dan komite sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yaitu bertanggung jawab, mendampingi, mengawasi, memotivasi, dan menjadi teladan bagi anak dalam penanaman nilai-nilai karakter di lingkungan sekolah. Selain itu, pelaksana kebijakan juga berperan dalam merancang kebijakan, tata tertib, dan program kegiatan penunjang implementasi kebijakan pendidikan karakter serta melakukan evaluasi terhadap perkembangan anak dan pembelajaran.

Demikian dapat diketahui bahwa sikap pelaksana kebijakan di RA SBB Al Fikri Manca Bantul sudah berkompeten dalam menjalankan tugasnya, dengan begitu sikap pelaksana menjadi salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Hal itu sesuai dengan indikator disposisi atau tanggapan

pelaksana dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

5. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi antar organisasi pelaksana dilakukan secara efektif sehingga kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebijakan pendidikan berbasis budaya sekolah di RA SBB Al Fikri Manca Bantul mampu dilaksanakan dengan lancar melalui pembiasaan nilai-nilai karakter dan program penunjang pendidikan karakter oleh seluruh warga sekolah. Hal itu sejalan dengan pernyataan (Kasmad, 2013: 43) bahwa komunikasi antar organisasi pelaksana diperlukan untuk memperlancar proses berjalannya sumber-sumber informasi dalam memperjelas standar-standar atau indikator-indikator kinerja kebijakan.

Komunikasi antar organisasi dilakukan dengan koordinasi antar pelaksana kebijakan melalui *WhatsApp Grup* maupun personal chat, buku penghubung, Pertemuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), Paguyuban Orang Tua (POT), dan guru selalu melakukan kunjungan ke rumah anak. Hal-hal yang dikomunikasikan adalah perkembangan anak dan evaluasi kegiatan pembelajaran. Orang tua juga dapat menyampaikan evaluasi terhadap kinerja kepala sekolah dan guru selama mengajar anaknya. Selain

menjalin komunikasi, pelaksanaan nilai-nilai karakter di lingkungan sekolah juga dikembangkan menggunakan 3 (tiga) cara belajar yaitu dengan *moral knowing* (memberikan konsep pemahaman tentang moral), *moral feeling* (perasaan tentang moral), dan *moral action* (perbuatan moral) yang disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Tiga cara belajar tersebut kemudian didukung dengan koordinasi yang dilakukan kepala sekolah dalam rapat mengenai pelaksanaan pendidikan karakter. Selanjutnya guru menginstruksikan kegiatan yang sejalan dengan prinsip pendidikan pendidikan karakter di lingkungan sekolah melalui pemberian materi, pendampingan, pengawasan, teladan, dan pembiasaan nilai-nilai karakter bagi anak.

Kegiatan-kegiatan pelaksanaan pendidikan karakter pada penelitian ini berfokus dalam implementasi 5 (lima) nilai utama karakter yang bersumber dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal, yang terkandung dalam 9 (sembilan) pilar karakter dari *Indonesia Heritage Foundation* (IHF) yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah. Implementasi 5 (lima) nilai utama karakter yaitu nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan

integritas menjadi upaya sekolah dalam menyukseskan implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah melalui pembiasaan nilai-nilai karakter di lingkungan sekolah.

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui bahwa sekolah sudah mampu menjalin komunikasi antar pelaksana kebijakan terutama orang tua/wali murid dengan baik. Sekolah juga sudah mampu menjalankan kegiatan pengembangan pendidikan karakter dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam pelaksanaan nilai karakter. Hasil pembahasan tersebut telah sesuai dengan indikator komunikasi antar organisasi pelaksana dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan dari Van Meter dan Van Horn.



Gambar 3. Kegiatan Upacara Bendera

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Keadaan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di sekitar RA SBB Al Fikri Manca Bantul cukup mendukung implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah. Ketiga lingkungan tersebut mampu menyongsong

berbagai kegiatan yang diadakan sekolah dengan tanggap, sehingga hal itu menjadi sebuah bentuk dukungan yang diberikan untuk sekolah dalam menyukseskan implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah. Hal itu sejalan dengan Winarno (2012: 167) menyatakan bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang kurang kondusif dapat berakibat fatal yang menyebabkan kegagalan dalam kinerja implementasi kebijakan sehingga aspek tersebut harus diperhatikan.

Dukungan lingkungan sosial datang dari orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dan pemerintah desa setempat. Dukungan dari lingkungan sosial menjadi bukti bahwa dalam proses implementasi kebijakan pendidikan karakter tidak hanya sekolah yang berusaha menciptakan lingkungan kondusif, akan tetapi pihak luar sekolah juga berusaha menciptakannya. Selain itu, lingkungan ekonomi yang dimiliki sekolah sudah mampu mendukung implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah di RA SBB Al Fikri Manca Bantul. Sekolah juga bersikap netral dengan kegiatan politik karena sekolah tidak memiliki hubungan dengan lingkungan politik jika lingkungan politik dimaknai sebatas keikutsertaan dalam kegiatan partai politik, akan tetapi dukungan politik diperoleh atau dirasakan sekolah ditunjukkan melalui regulasi yang

diturunkan langsung dari kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia oleh Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama setempat kepada sekolah. Regulasi merupakan produk politik yang dapat mendukung implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah di RA SBB Al Fikri Manca Bantul.

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah di RA SBB Al Fikri Manca Bantul. Dukungan yang diberikan untuk sekolah selaras dengan indikator lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah di RA SBB Al Fikri Manca Bantul

Faktor pendukung implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah di RA SBB Al Fikri Manca meliputi dukungan dari sumber daya manusia yang berkompeten, sarana dan parasarana yang memadai, program kegiatan penunjang implementasi kebijakan yang dirancang sekolah, dan pemberian *reward* sebagai bentuk motivasi

yang diberikan sekolah kepada anak agar selalu antusias dalam menanamkan nilai-nilai karakter di lingkungan sekolah. Beberapa hal yang telah disebutkan tersebut menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan karakter di sekolah. Hal itu sejalan dengan pendapat Wahab dalam Irianto (2011: 42) yang menyebutkan bahwa kejelasan rumusan masalah dan alternatif pemecahan masalah serta sumber-sumber potensial yang mendukung merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Berbagai cara dilakukan sebagai upaya sekolah dalam mempertahankan faktor pendukung implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah yang dimiliki, yaitu meliputi menjaga sarana dan prasarana, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, Alat Permainan Edukatif (APE) dan buku-buku diletakkan di area yang mudah dijangkau oleh anak, guru terus belajar, menyusun program kegiatan semenarik mungkin agar anak merasa senang dalam mengikuti kegiatan, membangun komunikasi dua arah antara guru dan orang tua untuk memantau perkembangan anak, dan sebagainya.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah di RA SBB Al Fikri Manca Bantul

Faktor penghambat yang dimiliki sekolah menjadi suatu kendala yang dihadapi sekolah sehingga mempengaruhi proses implementasi kebijakan berbasis budaya sekolah di RA SBB Al Fikri Manca Bantul. Faktor penghambat tersebut meliputi beberapa sarana dan prasarana rusak, kurangnya sumber dana, kurangnya guru di sekolah, beberapa orangtua kurang memahami keberlanjutan implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah, anak sulit dikondisikan saat kegiatan berlangsung, dan sebagainya. Hal itu selaras dengan pernyataan Wahab dalam Irianto (2011: 42) bahwa sumber-sumber potensial yang mendukung dan keahlian pelaksana kebijakan merupakan unsur-unsur yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan.

Upaya sekolah dalam mengatasi faktor penghambat yaitu mengadakan *parenting* untuk orang tua, guru melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum mengajar, guru mengikuti pelatihan pendidikan karakter yang diadakan *Indonesia Heritage Foundation* (IHF), membangun komunikasi dengan orang tua, menjaga sarana dan prasarana, melakukan

bonding dengan anak agar anak percaya diri, dan berbagai bentuk upaya lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah di RA SBB Al Fikri Manca Bantul dilaksanakan dengan memperhatikan 6 (enam) indikator implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi atau tanggapan para pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Fokus penelitian ini adalah implementasi 5 (lima) nilai utama karakter yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas yang diterapkan melalui pembiasaan di lingkungan sekolah. Terdapat tiga landasan hukum yang digunakan sebagai pedoman salah satunya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal. Selain itu, sekolah juga berpedoman pada Sembilan Pilar Karakter dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kebijakan tersebut bertujuan sebagai langkah awal dalam menciptakan generasi muda yang

berakhlak mulia melalui penanaman pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Proses implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah di RA SBB Al Fikri Manca Bantul dipengaruhi adanya ketersediaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber dana, dan sarana prasarana; karakteristik organisasi yang meliputi struktur organisasi, norma-norma, serta pembagian peran antara sekolah dan orang tua; implementor yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya sesuai tupoksi; komunikasi antara sekolah dan orang tua serta kegiatan-kegiatan pelaksanaan yang dikembangkan menggunakan *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action* sesuai dengan kurikulum sekolah; dan dukungan dari lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang diberikan dalam rangka menyukseskan implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah di RA SBB Al Fikri Manca Bantul.

Faktor pendukung implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah di RA SBB Al Fikri Manca Bantul yaitu meliputi sumber daya manusia yang berkompeten, sarana dan prasarana yang memadai, adanya program penunjang pendidikan karakter di sekolah, dan pemberian *reward* sebagai apresiasi yang diberikan sekolah untuk memotivasi anak dalam melakukan kegiatan penanaman pendidikan karakter.

Faktor penghambat implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah yaitu beberapa sarana dan prasarana rusak, kurangnya sumber dana, sedikitnya guru dengan murid yang banyak sehingga menyebabkan kurangnya konsentrasi dalam memberikan materi pembelajaran dan kualahan dalam mengawasi anak, anak sulit dikondisikan saat kegiatan berlangsung, beberapa orang tua kurang paham dengan keberlanjutan implementasi kebijakan yang diterapkan di sekolah, dan sebagainya.

Saran

1. Bagi Sekolah

- a. Perlunya penyusunan program tahunan secara terperinci agar dalam pelaksanaannya lebih terarah.
- b. Mengoptimalkan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan karakter mengingat karakter merupakan pondasi bagi setiap individu.
- c. Perlunya rekrutmen guru karena sekolah hanya memiliki tiga guru dan satu kepala sekolah yang merangkap jadi guru sehingga menyebabkan fokus guru terpecah saat mendampingi anak.
- d. Mengoptimalkan komunikasi kepada orang tua untuk memantau perkembangan anak di rumah.

2. Bagi Orang tua/wali

- a. Perlunya pemahaman orang tua terhadap keberlanjutan pendidikan karakter yang diajarkan di sekolah pada lingkungan keluarga maupun masyarakat.
- b. Mengoptimalkan komunikasi kepada sekolah untuk memantau perkembangan anak di sekolah.

3. Bagi Peneliti

- a. Penelitian terkait judul ini masih memiliki kekurangan, sehingga peneliti selanjutnya diharap melakukan penelitian yang lebih baik.

Rekomendasi Kebijakan

1. Menentukan program perekrutan guru karena sekolah hanya memiliki tiga guru dan kepala sekolah yang merangkap menjadi guru.
2. Menentukan program penyusunan kegiatan tahunan secara terperinci agar dalam pelaksanaannya lebih terstruktur.
3. Membentuk tim khusus pendidikan karakter dengan tugas dan wewenang membuat kebijakan dan program pada level sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Dwiningrum, S. I. A. (2014). *Modal Sosial dalam Pengembangan Pendidikan (Perspektif Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: UNY Press.

- Irianto, Y. B. (2011). *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan, Konsep, Teori dan Model*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara
- Milles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook* (3rd ed.). Arizona: United States of America.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umaroh, S. (2018). *Membangun Karakter Anak Usia Dini Melalui Budaya Sekolah Usia 5-6 Tahun Di Raudhatul Athal Nurul Huda Suban Lampung Selatan*. *Skripsi*. Universitas Raden Intan Lampung.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Van Meter, Donald S. & van Horn, Carl E. (1975). *The Policy Implementation Process. A Conceptual Framework: Administration & Society Journal*.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: UNY Press.
- _____, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.